

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE*  
*GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
BPR JAWA TENGAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**DEDY SUSANTO**  
**NIM. C2C009210**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2014**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Dedy Susanto  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009210  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*  
Terhadap Kinerja Keuangan BPR Jawa Tengah

Dosen Pembimbing : Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 15 Desember 2014  
Dosen Pembimbing,

(Dr. Haryanto, S.E, M.Si, Akt.)  
NIP.197412222000121001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Dedy Susanto  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009210  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi  
Judul Skripsi : **Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*  
Terhadap Kinerja Keuangan BPR Jawa  
Tengah**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 23 Desember 2014**

Tim Penguji

1. Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Puji Harto, S.E., M. Si., Akt., Ph.D. (.....)
3. Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt. (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dedy Susanto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan BPR Jawa Tengah**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Semarang, 15 Desember 2014

Yang membuat pernyataan,

(Dedy Susanto)

NIM: C2C009210

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Jangan pernah menyerah sebelum berperang, jangan pernah menyerah sebelum mencoba, karena tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini jika kita berusaha”*

*Skripsi ini persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta :  
Yafet Sutrisno dan Maria Sakini,  
adik tersayang :  
Cindy S.P, Sinta Bella S.P, dan Jonathan Alexander  
serta kekasih hati, seluruh keluarga, sahabat, juga teman-  
teman terbaik.*

## **ABSTRACT**

This study aimed to examine the effect of corporate governance mechanisms on the financial performance of BPR in Central Java. Financial performance calculated by using four ratios NPL, CAR, LDR, and ROA. Corporate governance mechanism is determined by variable commissioners, board of directors, and the size of the company.

The sample in this study is the BPR in Central Java are registered at Bank Indonesia in the period 2012-2013. The samples used a total of 119 BPR were taken using purposive sampling. The method of analysis in this study using multiple regression and SPSS 16 program.

The results of this study indicate that the board of directors and a significant negative effect on the performance of BPR as measured by NPL, CAR, and ROA, but no significant effect on the LDR. The size of the board of directors significantly to the ROA, however no significant effect on the NPL, CAR, and LDR. Firm size significantly and negatively trending on NPL and CAR, but no significant effect on ROA and LDR.

**Keywords : Corporate governance, board of commissioners, board of directors, company size, financial performance.**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan BPR di Jawa Tengah. Kinerja keuangan di hitung dengan menggunakan empat rasio yaitu NPL, KPMM, LDR, dan ROA. Mekanisme *corporate governance* ditentukan oleh variabel dewan komisaris, dewan direksi, dan ukuran perusahaan.

Sampel dalam penelitian ini adalah Bank BPR di Jawa Tengah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2012-2013. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 119 BPR yang diambil menggunakan purposive sampling. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dan program spss 16.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja BPR yang diukur dengan NPL, KPMM, dan ROA, namun tidak signifikan terhadap LDR. Ukuran dewan direksi signifikan terhadap ROA Namun tidak signifikan terhadap NPL, KPMM, dan LDR. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan berarah negatif pada NPL dan KPMM namun tidak signifikan terhadap ROA dan LDR.

**Kata Kunci:** *Corporate governance*, dewan komisaris, dewan direksi, ukuran perusahaan, kinerja keuangan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan BPR Jawa Tengah)**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis meyakini kesulitan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dari awal perkuliahan sampai detik ini. Terimakasih untuk berkah dan rahmat-Nya yang tidak pernah berhenti sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Faisal S.E., M.Si., Akt., Ph. D. selaku dosen wali yang telah memberi dukungan selama masa perkuliahan berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan pengajaran dan bekal ilmu pengetahuan serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.



7. Rommy dan Atta yang telah memberi pelajaran berharga kepada penulis tentang bagaimana cara menggunakan *software SPSS* dengan baik dan benar.
8. Seluruh keluarga besar Akuntansi FEB Undip 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, untuk kebersamaannya dan teman berbagi ilmu serta pengalaman dari awal perkuliahan sampai saat ini. Sukses untuk kita semua.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 15 Desember 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Landasan Teori .....	9
2.1.1 Teori Agensi .....	9
2.1.2 Konsep Perbankan .....	11
2.1.3 Corporate Governance .....	13
2.1.3.1 Pengertian Corporate Governance .....	13
2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Corporate Governance .....	15
2.1.4 Indikator Mekanisme Corporate Governance .....	19
2.1.4.1 Ukuran Dewan Komisaris.....	19
2.1.4.2 Ukuran Dewan Direksi .....	22

2.1.4.3	Ukuran Perusahaan ...	24
2.1.5	Pengertian dan Konsep Dasar Kinerja .....	27
2.1.5.1	Kinerja Keuangan .....	27
2.1.5.2	Kinerja Perbankan.....	28
2.1.5.3	Pengukuran Kinerja Keuangan .....	28
2.1.5.4	Evaluasi Kinerja.....	31
2.2	Penelitian Terdahulu .....	32
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis .....	40
2.3.1	Kerangka Pemikiran Teoritis .....	40
2.3.2	Pengembangan Hipotesis.....	41
2.3.2.1	Pengaruh Ukuran dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan BPR.....	41
2.3.2.2	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan BPR.....	42
2.3.2.3	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan BPR.....	43
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	44
3.1.1.	Variabel Dependen .....	44
3.1.2.	Variabel Independen .....	45
3.2.	Populasi dan Sampel Penelitian .....	46
3.3.	Jenis dan Sumber Data .....	50
3.4.	Metode Pengumpulan Data .....	50
3.5.	Metode Analisis .....	50
3.5.1.	Statistik Deskriptif .....	51
3.5.2.	Pengujian Asumsi Klasik .....	52
3.5.2.1	Uji Multikolinearitas.....	52
3.5.2.2	Uji Autokorelasi.....	53
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas .....	53
3.5.2.4	Uji Normalitas.....	54
3.5.3.	Pengujian Goodness Of Fit .....	54

3.5.3.1 Uji Simultan (Uji F).....	54
3.5.3.2 Uji Parsial (Uji t).....	55
3.5.3.3 Koefisien Determinasi .....	55
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....</b>	<b>57</b>
4.1. Statistik Deskriptif .....	57
4.2. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis .....	60
4.2.1. Screening Data .....	60
4.2.2. Uji Asumsi Klasik .....	61
4.2.2.1. Uji Normalitas .....	62
4.2.2.2. Uji Multikolinieritas .....	63
4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas.....	64
4.2.2.4. Uji Autokorelasi .....	65
4.2.3. Analisis Regresi Berganda .....	66
4.2.4. Uji Model Fit .....	66
4.2.5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	67
4.2.6. Uji Hipotesis .....	68
4.2.6.1 Model 1 (Dependen NPL).....	68
4.2.6.2 Model 2 (Dependen KPMM).....	69
4.2.6.3 Model 3 (Dependen LDR) .....	70
4.2.6.4 Model 4 (Dependen ROA).....	71
4.3. Pembahasan .....	72
4.3.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja BPR .....	72
4.3.2. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja BPR .....	73
4.3.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja BPR .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
5.1. Kesimpulan .....	75
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	76
5.3. Saran .....	76

DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	82

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu .....	37
Tabel 3.1 Seleksi Sampel Penelitian .....	47
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	57
Tabel 4.2 Identifikasi Outlier .....	60
Tabel 4.3 Identifikasi Outlier Kedua .....	61
Tabel 4.4 Uji Normalitas .....	62
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas .....	63
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas .....	64
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi Model Regresi.....	65
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi .....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 4.1 Gambar Scaterplot.....	64

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN A	Data Sekunder BPR Jawa Tengah.....	82
LAMPIRAN B	Hasil Olah Data Statistik .....	93



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Bab pertama dari skripsi adalah pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penerapan *good corporate governance* menjadi permasalahan yang penting dalam dunia perbankan. Semenjak krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997 telah menghancurkan berbagai sendi perekonomian salah satunya mengakibatkan krisis perbankan terparah dalam sejarah yang mengakibatkan penurunan kinerja perbankan nasional. Dalam seminar restrukturisasi perbankan di Jakarta pada tahun 1998 disimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja perbankan, antara lain semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan, yang menyebabkan bank harus menyediakan cadangan penghapusan hutang yang cukup besar, sehingga mengakibatkan kemampuan bank memberikan kredit menjadi terbatas; dampak likuiditas bank yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah, sehingga memicu penarikan dana yang secara besar-besaran; semakin turunnya permodalan bank-bank, banyak bank yang tidak mampu melunasi kewajibannya karena menurunnya nilai tukar rupiah, juga manajemen bank yang tidak profesional menurut Dewayanto (2010).

Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang fair. Lemahnya penerapan *corporate governance* inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan. Banyak pihak yang mulai berpikir bahwa penerapan *corporate governance* menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan oleh Irmala Sari (2006).

Dengan melihat beberapa contoh kasus tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan *corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris dan stakeholders lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja Deni, dkk. (2004).

Dalam penelitian Andriyan (2010) mengidentifikasi mekanisme *corporate governance* sebagai upaya penegakan praktik *corporate governance* dalam perusahaan diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan dan juga diharapkan mampu untuk mengontrol biaya keagenan (Itturiaga dan Sanz (1998) dalam Suranta dan Mahfoedz (2003). Menurut Walsh dan Seward (1990) dalam Arifin (2005), mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi. Sedangkan mekanisme *corporate governance* menurut Boediono (2005) adalah suatu sistem

yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan.

Wulandari (2006) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* yang dilihat dari jumlah direktur, proporsi dewan komisaris independen, *debt to equity ratio* (DER) dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan yang memperoleh hasil bahwa hanya variabel DER yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) juga menyatakan bahwa variabel mekanisme *corporate governance* dalam hal kepemilikan manajerial dan ukuran dewan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dimana kepemilikan manajerial menunjukkan pengaruh negatif sedangkan ukuran dewan menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian oleh Sam'ani (2008) menemukan bukti empiris adanya pengaruh indikator mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan. Penerapan *good corporate governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri. Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Penelitian mengenai hubungan *good corporate governance* dan kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, baik penelitian yang menggunakan index penilaian *corporate governance* maupun struktur mekanisme *corporate governance*. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya menemukan perbedaan dalam praktik tata kelola perusahaan di berbagai industri, khususnya di pasar negara berkembang. Dari penelitian yang ada selama sepuluh tahun terakhir setelah krisis di Asia, berbagai penelitian lebih banyak difokuskan pada perusahaan non keuangan dalam rangka untuk mengamati praktik tata kelola perusahaan menurut Wallace dan Zinkin (2005). Penelitian mengenai mekanisme tata kelola perusahaan perbankan dilakukan oleh Zulkifli dan Samad (2007) dalam penelitiannya mengkaji perbedaan antara tata kelola perusahaan perbankan dengan non keuangan. Bukti menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara mekanisme tata kelola perusahaan untuk sektor keuangan seperti perusahaan perbankan dan perusahaan non keuangan. Bukti lain juga menunjukkan adanya suatu masalah moral hazard dalam operasional perusahaan perbankan seperti *transfer pricing*, *asset stripping*, mempekerjakan anggota keluarga, dan alokasi kredit yang tidak semestinya yang menyebabkan dampak negatif pada kinerja bank. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi lebih dalam pengukuran tata kelola dan kinerja perusahaan sektor perbankan secara khusus yaitu BPR swasta yang beroperasi di Propinsi Jawa Tengah, yang ditentukan oleh mekanisme tata kelola perusahaan diantaranya ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran perusahaan. Sedangkan kinerja keuangan BPR akan diukur dari *non performing loan* (NPL), kewajiban penyediaan modal minimum

(KPMM), *loan to deposit ratio* (LDR) dan *return on assets* (ROA).

Menurut penelitian Rachmadan (2013) manajemen bank juga perlu untuk memperhatikan besarnya *non performing loan* (NPL). Hal tersebut mengingat bahwa kredit merupakan fokus, kegiatan utama perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya dan kredit merupakan sumber pendapatan keuntungan terbesar bagi bank. Namun demikian yang perlu diwaspadai adalah kredit merupakan jenis kegiatan penanaman dana yang sering kali justru menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah yang cukup serius.

Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya kecukupan modal yang dimiliki bank. Semakin efisien modal bank yang digunakan untuk aktivitas operasional mengakibatkan bank mampu meningkatkan pemberian kredit sehingga akan mengurangi tingkat risiko bank.

*Loan to deposit ratio* (LDR) merupakan rasio keuangan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. Semakin rendah LDR, maka semakin tinggi tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi LDR, maka semakin tinggi tingkat kredit bank. Semakin besar tingkat kredit yang diberikan, semakin meningkatkan potensi risiko kredit (gagal bayar) dan apabila LDR terlalu tinggi, bank justru dapat mengalami permasalahan berupa kesulitan likuiditas.

*Return on assets* (ROA) mewakili aspek *earnings* dalam analisis kinerja keuangan BPR. Rasio ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih. Semakin besar rasio ROA menunjukkan tingkat pencapaian laba yang semakin besar sebagai

indikator efisiensi operasional BPR (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Tengah.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR Jawa Tengah?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR Jawa Tengah?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPR Jawa Tengah?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *corporate governance* (CG) yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan di Jawa Tengah yang diukur dengan *non performing loan* (NPL), kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM), *loan to deposit ratio* (LDR), *return on assets* (ROA).

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Menumbuhkan kesadaran penerapan dan pengungkapan mekanisme *corporate governance* bagi para perusahaan dan para pemangku kepentingan.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi bagi investor.
3. Memberikan gambaran mengenai mekanisme *corporate governance* pada perusahaan perbankan dari faktor-faktor yang mendukung serta menghambat *corporate governance*, serta dapat menjadi masukan bagi perusahaan perbankan untuk melaksanakan *corporate governance* secara terus menerus.
4. Bagi kalangan akademik dan pembaca, diharapkan menambah studi literatur tentang kualitas pengungkapan mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan dan menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Merupakan penjelasan tentang isi dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi. Penulisan skripsi ini dipaparkan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB 1                   PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran secara garis besar tentang permasalahan yang diangkat. Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.

**BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah atau topik yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran yang mendasari hipotesis dalam penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.



## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

Bab kedua dari skripsi adalah telaah pustaka. Tinjauan pustaka berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan pengembangan hipotesis yang menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan BPR di Jawa Tengah.

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Manajemen perusahaan merupakan agen dan pemegang saham merupakan *principal* yang berkepentingan akan kepemilikannya atas perusahaan, mendelegasikan proses pengambilan keputusan sehari-hari terhadap manajemen. Jika kedua pihak memiliki kepentingan masing-masing yang sama kuat, maka agen cenderung tidak akan selalu bertindak sebaik-baiknya untuk memenuhi ekspektasi *principal*. Teori agensi menyatakan bahwa dalam asimetri informasi, manajemen dapat memilih keputusan yang memaksimalkan kepentingannya. Keputusan ini berbeda dengan keputusan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Teori agensi juga menyatakan bahwa konflik yang muncul dari kemampuan pemegang saham dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen, dapat mengurangi nilai perusahaan. *Principal* atau pemegang saham dapat membatasi tindakan agen dengan melakukan

pengendalian yang tepat untuk memastikan kepentingannya terpenuhi (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Ariyudha 2010).

Menurut Pramono (2011) asumsi utama teori keagenan adalah *principal* dan *agen* mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri dalam menjalankan hubungan kontrak tersebut seringkali kepentingan dan tujuan tersebut berbeda. Perbedaan kepentingan dan tujuan tersebut dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan (*agen*) cenderung untuk mengejar tujuan pribadinya, misalnya mendapatkan insentif, sedangkan *principal* menginginkan hasil kinerja perusahaan yang meningkat sehingga mereka mendapatkan *return* atas investasi yang mereka buat. Hal ini dapat juga disebut konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik kepentingan ini dapat disebabkan dan menyebabkan asimetri informasi antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agen*). Asimetri informasi adalah keadaan dimana suatu pihak mempunyai informasi yang lebih banyak dibanding pihak lainnya.

Salah satu cara untuk mengurangi perbedaan kepentingan dan asimetri informasi adalah dengan melakukan penerapan dan pengungkapan terkait isu *corporate governance*. Dengan penerapan mekanisme *corporate governance*, diharapkan perusahaan sebagai *agen* dapat melaksanakan tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham sebagai *principal* Warsono, dkk. (2009). Sehingga konflik kepentingan antara *agen* dan *principal* dapat diminimalkan. Untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan *corporate governance* sebagai wujud komitmennya terhadap pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham, perusahaan

dituntut untuk melakukan pengungkapan informasi *corporate governance*. Dengan pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan perusahaan, khususnya yang terkait dengan isu *corporate governance*, diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara perusahaan (*agen*) dan pemegang saham (*principal*).

Menurut Muh Arief Ujiyantho (2007) *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *returns* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) dan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.

### **2.1.2 Konsep Perbankan**

Menurut Kuncoro (2002), bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jenis Bank yang diakui secara resmi hanya terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (UU No.7, 1992). Secara umum, fungsi bank adalah:

1. Fungsi mobilisasi, yaitu menghimpun dana kecil-kecil dan terbesar dan menyalurkannya ke dalam investasi yang lebih besar.
2. Fungsi likuiditas, yaitu mempunyai kemampuan untuk memelihara likuiditas alat-alat finansial dan menjamin agar alat-alat tersebut dapat dicairkan menjadi uang tunai. Pencairan dana dapat dicairkan dengan segera tanpa menunggu alat-alat tersebut jatuh tempo.
3. Fungsi penyatuan *maturity*, yaitu: mampu menyediakan dana setiap saat, tanpa terikat pada jatuh temponya portofolio alat-alat finansial.

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang No.10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap yaitu, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; memberikan kredit; menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan-kegiatan yang dilarang bagi BPR dalam melakukan transaksi berdasarkan undang-undang diatas antara lain, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; melakukan penyertaan modal; melakukan usaha perasuransian; dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud diatas.

### **2.1.3 Corporate Governance**

#### **2.1.3.1 Pengertian Corporate Governance**

Istilah *corporate governance* menjadi kian populer karena disebabkan oleh dua hal. Pertama, *corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus menang dalam persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi dikawasan Asia dan Amerika diyakini muncul karena kegagalan penerapan *corporate governance*, diantaranya praktik perbankan yang lemah, sistem hukum yang buruk, pengawasan yang lemah, dan hak-hak pemegang saham minoritas yang kurang diperhatikan dalam pernyataan Hutapea (2013). Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum, *good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Bank dunia (*World Bank*) (1994) mendefinisikan *corporate governance*

sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. *Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI)* (2001) juga menyatakan *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Selain itu, FCGI juga menjelaskan bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Corporate governance* juga dapat digunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan komisaris, dewan direksi, pengurus (pengelola) perusahaan, dan para pemegang saham.

Komite nasional kebijakan *corporate governance* (KNKG) (2006), mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan perundangan dan norma yang berlaku.

*The Indonesia institute for corporate governance (IICG)* mendefinisikan *corporate governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai

dengan harapan para *stakeholders*. Selain itu, IICG juga mendefinisikan pengertian mengenai *corporate governance* yang baik sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Defenisi tersebut memberikan kesimpulan bahwa *corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan (Bukhori dan Raharja, 2012).

### **2.1.3.2 Prinsip-prinsip *Corporate Governance***

Menurut Rusmaryati (2012), salah satu pilar penting dalam *good corporate governance* di perbankan adalah komitmen penuh dari seluruh jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Maka dari itu seluruh karyawan wajib untuk menjunjung tinggi prinsip *good corporate governance*. Dalam penerapannya, komite nasional kebijakan *corporate governance* (KNKG) menyusun prinsip-prinsip yang mengatur *good corporate governance*, diantaranya: seperti *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness* (TARIF) seperti halnya sebagai berikut:

#### a) *Transparency* (Keterbukaan)

Dalam hal keterbukaan yang perlu dilakukan oleh suatu bank yaitu harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan,

susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan resiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan *good corporate governance* serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

b) *Accountablity* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dan keseimbangan diantara stakeholders dapat terlaksana secara efektif. Para komisaris, direksi, dan jajarannya wajib memiliki integritas untuk menjalankan usaha sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Bank juga harus menyakini bahwa semua organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and*



*punishment system.*

c) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban merupakan adanya kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menuntut seluruh jajaran perusahaan untuk melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab dan mematuhi hukum yang ditetapkan. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. Bank juga harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

d) *Independency* (Kemandirian)

Pengelolaan perusahaan yang dikelola secara profesional tanpa pengaruh, tekanan dan benturan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk memenuhi kemandirian bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict interest*) serta harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan.

e) *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Setiap

keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Melindungi pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara. Bank juga sebaiknya memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Menurut *the organization for economic corporation and development* (OECD) (1999) terdapat enam aspek pedoman pengembangan kerangka kerja legal, institusional, dan regulator untuk *corporate governance*, yaitu:

- a) Memastikan adanya basis efektif untuk kerangka kerja *corporate governance* mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan mengartikulasikan dengan jelas pembagian tanggung jawabnya diantara para pihak. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan bahwa hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi.
- b) Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham, seluruh pemegang saham mayoritas manapun.
- c) Peran *stakeholders* dalam *corporate governance* harus diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak kerja sama aktif antara perusahaan-perusahaan dan para *stakeholders* harus dikembangkan dalam upaya kelangsungan perusahaan.

d) *Disclosure* dan transparansi yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan governance perusahaan.

e) Tanggung jawab pengurus perusahaan (*corporate boards*): pengawasan dewan komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi keuangan harus berjalan efektif disertai adanya tuntutan strategik terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas direksi dan dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

#### **2.1.4 Indikator Mekanisme Corporate Governance**

##### **2.1.4.1 Ukuran Dewan Komisaris**

Pembentukan dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitor kinerja manajer. Surat keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta BEJ nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 mengharuskan perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk memiliki dewan komisaris yang memonitor perusahaan agar tercipta *good corporate governance* di Indonesia. Secara hukum dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi, dewan komisaris memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil pengawasan otoritas lain.

Dalam pasal 108 UU PT menjelaskan bahwa dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perusahaan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perusahaan terbuka

wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Komposisi dewan komisaris akan menentukan kinerja perusahaan. Namun pasal 116 UU PT lebih lanjut menjelaskan bahwa dewan komisaris wajib untuk membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang dilakukan yang telah dilakukan kepada RUPS.

Menurut Wardhani (2007) dalam suatu perusahaan dewan memegang peranan yang sangat signifikan dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Indonesia merupakan negara penganut sistem *two tier*, yaitu dewan terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. UU Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta bertugas menjadi pemberi nasihat kepada direksi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang berfungsi dalam monitoring kinerja manajemen, menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Yu (2006) menemukan bahwa makin sedikit dewan komisaris maka tindak kecurangan makin banyak karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. Dengan tingkat pengawasan yang baik maka akan

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, karena manajemen akan bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh stakeholders dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006). Sedangkan menurut Ruvinsky (2005), fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang tepat agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan *corporate governance* dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham. Jumlah yang tepat berarti jumlah yang dianggap secara proporsional untuk mewakili pemegang saham perusahaan agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan *corporate governance* dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham (Puspitasari dan Ernawati, 2010).

Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *chief executives officer* (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen serta semakin efektif memaksimalkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011), Sibarani (2010), dan Sari (2010) menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.

#### 2.1.4.2 Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Dalam sistem *two tier*, terdapat dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam mekanisme *corporate governance*, dewan direksi merupakan pihak *corporate governance* mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Pengendalian tersebut terletak pada fungsi dewan direksi (Beiner, dkk. 2003).

Menurut Buqhori (2012) dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah dewan direksi secara logis akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan. Karena tentu saja dengan adanya sejumlah dewan direksi, perlu dilakukan koordinasi yang baik antar anggota dewan direksi dan antar anggota dewan komisaris yang ada.

Menurut Nooreski (2013) dewan direksi merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan manajemen perusahaan. Dewan direksi bertugas menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi jangka panjang maupun jangka pendek.

Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi dianggap berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan memonitor perusahaan untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2012), Sam'ani (2008), dan Sekaredi (2011) menunjukkan pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi menurut Hardikasari (2011) perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang lebih kecil.

Menurut Nooreski (2013) ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan. Semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik. Sedangkan menurut Isshaaq (2009) *board size* atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan nilai perusahaanpun juga akan meningkat.

Menurut Jusuf Anwar (2005) dewan direksi secara eksplisit akan menanggung beberapa hal yang memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab dari pengurusan yang dilakukan oleh direksi antara lain: meninjau dan mengadopsi rencana strategis bagi perusahaan, mengawasi perilaku bisnis perusahaan untuk

mengevaluasi apakah bisnis telah dikelola dengan baik, mengidentifikasi resiko utama dan memastikan implementasi sistem yang tepat untuk mengelola resiko tersebut, dan perencanaan peralihan kekuasaan yang meliputi penunjukan, pelatihan, penetapan kompensasi dan bilamana diperlukan pergantian manajemen senior, mengembangkan dan melaksanakan program hubungan dengan investor ataupun kebijakan komunikasi dengan pemegang saham, mengkaji kecukupan dan integritas sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem informasi manajemen, termasuk sistem untuk kepatuhan dengan hukum yang berlaku, peraturan, aturan, arahan dan pedoman.

Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja bank karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan ketersediaan sumber daya (Faisal, 2005).

#### **2.1.4.3 Ukuran Perusahaan**

Menurut Hutapea (2013) ukuran perusahaan merupakan hal penting dalam proses pelaporan keuangan karena ukuran perusahaan menjadi tolak ukur besar kecilnya suatu perusahaan dan menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh investor dalam strategi berinvestasi. Indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran perusahaan adalah total penjualan, total aktiva, jumlah karyawan, *value added*, kapitalisasi nilai pasar, dan berbagai parameter lainnya. Ukuran perusahaan yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mempunyai aset yang besar dan perusahaan dengan aset besar biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Hal ini akan menyebabkan perusahaan lebih



berhati-hati dalam pelaporan keuangannya. Perusahaan diharapkan akan selalu berusaha menjaga stabilitas kinerja keuangan mereka. Untuk menghindari kecurangan dan manipulasi dalam laporan keuangan tersebut, maka diperlukan sistem *corporate governance* kondusif.

Perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi, penelitian oleh Wiesantana (2008). Sedangkan menurut Nasution (2007) perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat. Dengan ini disimpulkan bahwa manajer yang memimpin perusahaan yang lebih besar memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di perusahaan kecil.

Menurut Sudibyo (2009) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi kedalam 3 kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap tindakan manajemen laba. Besar kecilnya perusahaan akan memengaruhi manajer dalam membuat pelaporan keuangan dan prosedur akuntansi.

Menurut Darmawati (2004) ukuran perusahaan memperlihatkan bahwa suatu perusahaan yang lebih besar akan menghadapi masalah keagenan yang lebih

besar sehingga memerlukan penerapan *corporate governance* yang lebih baik (Haat, et al. 2008). Di dalam teori agensi dikatakan bahwa suatu perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Ukuran suatu perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan keuangannya. Perusahaan besar pada dasarnya memiliki modal finansial yang lebih besar dalam menunjang kinerja, tetapi disisi lain, perusahaan dihadapkan pada masalah keagenan yang lebih besar.

Menurut Deny, dkk. (2004) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *corporate governance* masih belum jelas arahnya. Perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar (karena lebih sulit untuk dimonitor) sehingga membutuhkan *corporate governance* yang lebih baik. Disisi lain, perusahaan kecil bisa memiliki kesempatan bertumbuh yang tinggi, sehingga membutuhkan dana eksternal, dan seperti argumen diatas, membutuhkan mekanisme *corporate governance* yang lebih baik.

Menurut Astuti (2007) perusahaan dengan total aset yang besar mencerminkan kemapanan perusahaan. Perusahaan yang sudah mapan biasanya kondisi keuangan juga stabil. Perusahaan besar mampu menarik minat investor yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena mempunyai fleksibilitas penempatan investasi yang lebih baik.

Menurut Triwanisis (2013) perusahaan besar cenderung mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat luas. Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga stabilitas dan kondisi ini, perusahaan tentu saja akan berusaha mempertahankan dan terus meningkatkan

kinerjanya.

## **2.1.5 Pengertian dan Konsep Dasar Kinerja**

### **2.1.5.1 Kinerja Keuangan**

Menurut Riani (2007) definisi kinerja sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dalam mengelola suatu organisasi atau perusahaan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi dan perbuatan dalam situasi tertentu, dimana setiap sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Wibowo, dkk (2004) menambahkan bahwa kinerja berasal dari pengertian *performance* yaitu sebagai hasil kerja baik yang berupa potensi kerja atau kegiatan yang membawa dampak buruk bagi perusahaan.

Pengertian kinerja keuangan secara umum merupakan suatu ukuran untuk untuk melihat tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil. Pengukuran terhadap pengembalian investasi, pertumbuhan, volume, laba, dan tenaga kerja pada perusahaan umum dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu tampilan perusahaan dalam periode tertentu. Menurut Mulyadi (2001) Penilaian kinerja keuangan merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi ataupun karyawan berdasarkan kinerja yang sudah ditentukan.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan penilaian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah dasar untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi perusahaan atau kinerja perusahaan, dengan dua variabel kunci yang digunakan sebagai ukuran penghubung antara reputasi

tanggung jawab sosial dengan kinerja ekonominya, yaitu kemampuan menciptakan pendapatan melalui penjualan dan tingkat kemampuan menciptakan laba (Sulastri, 2003 dalam Apriyanti, 2008).

#### **2.1.5.2 Kinerja Perbankan**

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Pengukuran kinerja keuangan merupakan pondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif. Penilaian kinerja bank sangat penting untuk *stakeholder* bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Kinerja perbankan sering dinilai terkait dengan tingkat kesehatan bank yang dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian merupakan laporan keuangan bank yang bersangkutan hal ini dijelaskan dalam UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 29 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia berhak menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank. Dengan demikian Bank Indonesia mengeluarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia.

#### **2.1.5.3 Pengukuran Kinerja Keuangan**

Dalam pengukuran kinerja keuangan BPR diukur dengan rasio-rasio keuangan sesuai dengan ketentuan PBI No. 6/10/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank. Berikut ini rasio keuangan yang digunakan sebagai ukuran kinerja keuangan BPR:

1. Aspek dari *Assets Quality* diwakili oleh rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang merupakan perbandingan antara kredit yang bermasalah dengan total kredit yang diberikan. Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen BPR dalam mengelola kredit bermasalah yang merupakan risiko yang dihadapi oleh BPR karena menyalurkan dananya dalam masyarakat. Semakin tinggi rasio NPL maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yang dapat mengganggu kinerja bank, menurut Nasser (2003). Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh BI, NPL adalah kredit yang termasuk kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet, dimana rasio NPL dalam suatu bank tidak boleh melebihi 5%. Menurut Irmayanto (2001) semakin banyak dana/uang terkumpul dari masyarakat pada suatu bank, maka bank tersebut mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat dana tersebut. Adapun bentuk penyaluran kembali dana tersebut sering kita kenal dengan nama pemberian kredit.

Menurut Ganiarto (2003) beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya NPL adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan analisis kredit yang dilakukan tidak sempurna, penyaluran kredit yang terlampau agresif dan monitoring kredit yang lemah juga terdapat gangguan pada debitur. Gangguan pada debitur disini diantaranya adalah hilangnya penghasilan debitur karena sakit, PHK, meninggal dan sebab-sebab lain atau salah urus perusahaan, kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam dunia bisnis serta adanya itikad tidak baik dari debitur. Sedangkan faktor eksternal merupakan memburuknya kinerja

ekonomi suatu negara, kebijakan pemerintah yang kontra produktif bencana alam dan lain-lain.

2. Aspek dari *Capital Adequacy* diwakili oleh rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menunjang kebutuhan BPR. Menurut Wisnu (2004) modal merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja bank yang tercermin dalam komponen CAMEL (*capital, asset, management, earning, liquidity*). Hal ini sesuai dengan surat edaran BI No. 8/28/DPBPR tahun 2006, maka KPMM untuk BPR tidak boleh kurang dari 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). ATMR merupakan nilai dari total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot resiko aktiva tersebut sesuai dengan ketentuan BI. Dengan demikian bila tingkat kecukupan modal dapat sesuai dengan ketentuan yang diharapkan maka akan membuat LDR di BPR menjadi baik.

3. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mewakili aspek likuiditas dalam industri BPR. Likuiditas suatu BPR berkaitan dengan ketersediaan dana BPR pada masa kini dan masa yang akan datang. Pengaturan likuiditas BPR bertujuan agar BPR dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan terutama kewajiban jangka pendek seperti simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito dengan menunjukkan rasio perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh BPR. Berdasarkan ketentuan BI besarnya LDR yang ideal berada dalam 78%-100%. Menurut Irmayanto (2001) suatu lembaga keuangan dinyatakan liquid apabila lembaga keuangan tersebut

dapat memenuhi kewajiban hutang, dapat membayar kembali serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

4. Rasio *Return On Assets* (ROA) mewakili aspek *earnings* dalam analisis kinerja keuangan BPR dengan rasio menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih, dalam penelitian Kuncoro dan Suhardjono (2002). Semakin besar rasio ROA menunjukkan tingkat pencapaian laba yang semakin besar sebagai indikator efisiensi operasional BPR.

#### **2.1.5.4 Evaluasi Kinerja**

Menurut Triwinasis (2013) dalam pelaksanaan kinerja keuangan membutuhkan evaluasi kinerja yaitu suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas (*performance*) seseorang atau sekelompok orang yang berada di beberapa unit kerja pada satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Ini berarti evaluasi kinerja memberikan nilai atas pekerjaan yang seseorang lakukan dan untuk diberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja tersebut. Dengan menggunakan cara ini seseorang ingin berprestasi dan prestasinya dihargai dan cenderung akan mempertahankan prestasinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Simanjuntak (2005) bahwa sebagian dari fungsi manajemen, proses evaluasi kinerja mengikuti akan perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi.

Evaluasi kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan saat terjadi keterlambatan atau penyimpangan dan mengetahui tingkat pencapaian perusahaan saat terjadi keterlambatan atau penyimpangan yang harus segera

diperbaiki sehingga sasaran dapat tercapai dan penyusunan rencana perusahaan dapat dilakukan menurut Suryati (2009). Penilaian Kinerja bisa didefinisikan sebagai prosedur apa saja yang meliputi penetapan standard kinerja, penilaian kinerja aktual karyawan dalam hubungan dengan standard-standard ini, dan memberi umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau terus berkinerja lebih tinggi.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian terdahulu akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan.

Dewayanto (2010) meneliti tentang mekanisme *good corporate governance* yang variabel independennya terdiri dari kepemilikan pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, rasio kecukupan modal (CAR), dan auditor eksternal, serta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan tidak signifikan, ukuran dewan komisaris dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan serta CAR, eksternal audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan



terhadap kinerja perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square (OLS) Regression Model*. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan total 22 perusahaan selama periode 2006-2008.

Wardhani (2007) meneliti tentang mekanisme *corporate governance* yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Variabel independennya adalah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Variabel dependennya adalah variabel *binary*, yaitu apakah perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan atau tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh dalam meminimalisasi kondisi tekanan keuangan. Komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan. Alat analisis yang digunakan adalah model logit. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan total sampel 51 perusahaan periode 1999-2004.

Nasiruddin (2005) dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *loan deposit ratio (LDR)* di BPR wilayah kerja kantor Bank Indonesia Semarang periode 2003. Populasi dalam penelitian ini adalah BPR yang masuk dalam wilayah kerja kantor Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah BPR yang masuk dalam wilayah kerja kantor Bank Indonesia Semarang yang berjumlah 366 BPR. Pada penelitian ini, populasinya adalah penelitian yang ada pada tahun 2003. Teknik pengambilan sampel dengan

menggunakan metode simple random sampling. Jumlah sampel yang akan digunakan pada penelitian ini betor Bank Indonesia Semarang yang berjumlah 366 BPR. Pada penelitian ini, populasinya adalah penelitian yang ada pada tahun 2003. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode simple random sampling. Jumlah sampel yang akan digunakan pada penelitian ini berjumlah 79 BPR di wilayah kerja Bank Indonesia Semarang. Data diperoleh dari data laporan berjumlah 79 BPR di wilayah kerja Bank Indonesia Semarang. Data diperoleh dari data laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, data laporan statistik ekonomi daan keuangan daerah yang ditern keuangan daerah yang diterbitkan secara bulanan oleh kantor BI Semarang, laporan kajian ekonomi regional provinsi Jawa Tengah III tahun 2003, dan laporan wajib BPR. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F untuk menguji keberartian pengarartian pengaruh secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 5%.

Okky (2010) meneliti tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan bank perkreditan rakyat. Sampel penelitian adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) swasta di Jawa Tengah. Kinerja keuangan BPR diukur dengan rasio NPL, KPMM, LDR, dan ROA. Mekanisme *corporate governance* diproksi dengan kepemilikan manajerial, proporsi *outside directors*, dan jumlah *board of directors*, dengan variabel kontrol ukuran BPR dan umur BPR. Hasil penelitian menemukan mekanisme *Corporate governance* secara simultan berpengaruh terhadap rasio NPL, KPMM, dan ROA. Secara parsial, kepemilikan manajerial dan proporsi *outside directors* menunjukkan pengaruh

negatif terhadap rasio NPL dan ROA, sedangkan jumlah BOD berpengaruh negatif terhadap rasio LDR.

Marihot Nasution dan Doddy Setiawan (2007) menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* yaitu komposisi dewan komisaris dan ukuran, keberadaan komite audit pada praktek *earnings management* pada perusahaan perbankan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Sampel penelitian ini semua bank umum perusahaan yang ada di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2004 terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Data penelitian dikumpulkan dari laporan keuangan Bank Umum untuk periode 2000 hingga 2004, dari Direktori Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dari tahun 2001 hingga 2005, dan juga dari website masing-masing perusahaan. Metode purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel penelitian. Dari metode ini, telah mengumpulkan 100 observasi dari 20 bank umum perusahaan/5 tahun. Dengan menggunakan analisis regresi berganda sebagai metode penelitian, hasil menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* yaitu komposisi dewan komisaris dan ukuran, serta adanya komite audit mempengaruhi manajemen laba bank umum perusahaan yang telah terdeteksi dengan menggunakan model akrual spesifik dari Beaver dan Engel (1996).

Ariyudha (2010) mengidentifikasi pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual. Pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan dalam penelitian ini terdiri dari tiga elemen mekanisme tata kelola perusahaan : komposisi dewan komisaris, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa: komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual, ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

Triwanisis (2013) dalam penelitian ini konsep indikator yang dipakai dalam mekanisme *corporate governance* terdiri dari: kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 28 bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji normalitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *corporate governance* yang diproxy oleh komite audit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen mempunyai hubungan negatif proporsi dewan komisaris independen mempunyai hubungan negatif.

Hutapea (2013) penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* ditentukan oleh variabel dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dalam periode 2007-2011. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 20 perusahaan yang diambil melalui purposive sampling. Metode penelitian ini menggunakan regresi berganda dan regresi sederhana program

SPSS 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, dewan direksi dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

**Tabel 2.2**

**Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
1	Totok Dewayanto (2010)	- Kinerja perusahaan: ROA	- Ukuran dewan komisaris - Ukuran dewan direksi - Komisaris independen -Ukuran perusahaan	- Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan - Ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja perbankan - Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja - Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan
2	Ratna Wardhani (2007)	-Kinerja perusahaan: variabel <i>binary</i>	- Ukuran dewan komisaris - Proporsi komisaris independen - Kepemilikan institusional -Ukuran perusahaan	-Dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja - Komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja

No	Peneliti dan Tahun	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
				-Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja
3	Okky Andriyan (2010)	Kinerja keuangan: - <i>Non performing loan</i> -Kewajiban penyediaan modal - <i>Loan to debt ratio</i> - <i>Return on assets</i>	Mekanisme <i>corporate governance</i> : -Kepemilikan manajerial -Proporsi <i>outside directors</i> -Jumlah <i>board of directors</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme <i>corporate governance</i> (CG) terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian menemukan mekanisme CG secara simultan berpengaruh terhadap rasio NPL, KPMM, dan ROA. Secara parsial, kepemilikan manajerial dan proporsi <i>outside directors</i> menunjukkan pengaruh negatif terhadap rasio NPL dan ROA, sedangkan jumlah BOD berpengaruh negatif terhadap rasio LDR.
4	Nasirudin (2005)	LDR ( <i>Loan To Deposit Ratio</i> )	-Tingkat kecukupan modal (CAR) -Kredit bermaslah (NPL) -Suku bunga kredit	Variabel tingkat kecukupan modal, variabel kredit bermasalah dan variabel suku bunga kredit berpengaruh signifikan terhadap LDR di BPR wilayah Jateng. Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut dengan nilai adjusted R square sebesar 0,916. Ini berarti variasi variabel LDR BPR sebagai

No	Peneliti dan Tahun	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
				variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel dependennya yaitu CAR, NPL dan suku bunga kredit sebesar 91% sedang sisanya dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.
5	Marihot Nasution dan Doddy Setiawan (2007)	Manajemen Laba	Corporate governance; -Komposisi dewan komisaris -Ukuran dewan komisaris -Komite audit -Ukuran perusahaan	Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan corporate governance terhadap tindak manajemen laba yang terjadi diperusahaan perbankan.
6	Anantya Ariyudha (2010)	-Tingkat Pengungkapan -Modal Intelektual (ICD)	-Komposisi dewan komisaris -Ukuran komite audit -Frekuensi pertemuan komite audit	Komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.
7	Candra Rifqi Triwinasis (2013)	Kinerja Keuangan (CFROA)	-Kepemilikan institusional -Proporsi dewan komisaris independen -Komite audit	Kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan (CFROA), komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
8	Amanda Julita Hutapea (2013)	Kinerja Keuangan (CFROA)	<i>Corporate governance</i> : -Dewan komisaris -Dewan direksi -Kepemilikan institusional -Leverage	Dewan komisaris berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, dewan direksi dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

No	Peneliti dan Tahun	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
			-Ukuran perusahaan	keuangan, sedangkan kepemilikan institusional dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

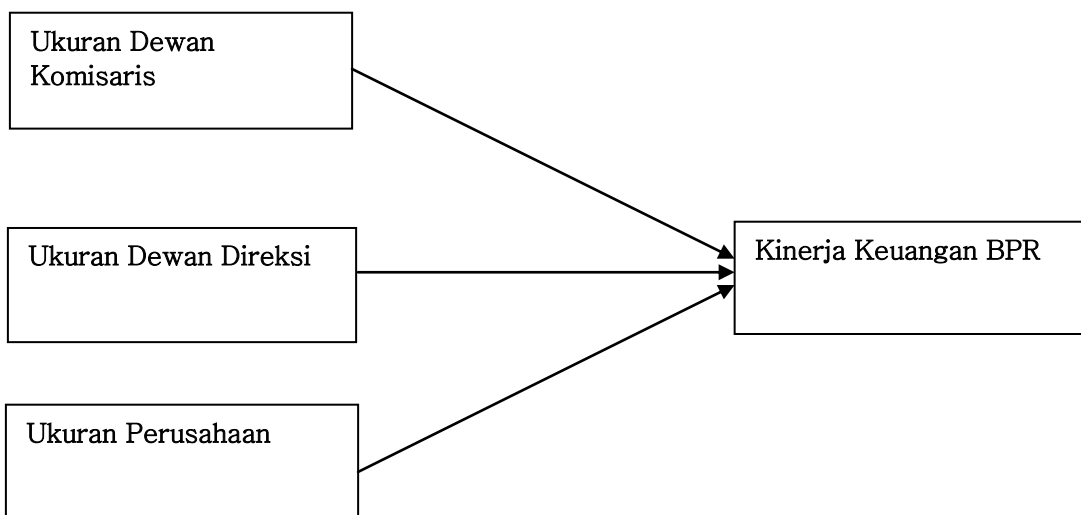
Sumber: dirangkum dari berbagai sumber jurnal

## 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penjelasan mengenai pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan BPR dapat dilihat singkat melalui kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang dibuat berupa gambar skema untuk lebih menjelaskan mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Gambar 2.1 adalah kerangka pemikiran dari penelitian mengenai pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan BPR. Dalam kerangka ini pula ditambahkan variabel independen yang berupa ukuran dewan komisaris, dewan direksi dan ukuran perusahaan.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**





## **2.3.2 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.2.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan BPR**

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual, penelitian ini akan membangun hipotesis dalam menguji hubungan bagaimana masing-masing variabel independen berhubungan dengan variabel dependen.

Dewan komisaris dalam pernyataan KNKG (2006) merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan melakukan praktik *corporate governance*. Menurut Wardhani (2007) dewan komisaris diyakini memiliki peran penting dalam pengelolaan perusahaan, khususnya manajemen puncak. Semakin besar ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan mengalami kondisi tekanan keuangan.

Dewan komisaris adalah salah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitor manajer. Ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas pengawasan. Prefer dalam Faisal (2005) mengungkapkan bahwa peningkatan ukuran dewan komisaris akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya.

Menurut Chtourou dkk (2001) dalam penelitiannya bahwa dengan jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari

sudut pandang *resources dependence*. Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR.**

### **2.3.2.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan BPR**

Dewan direksi merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan corporate governance yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan manajemen perusahaan. Dewan direksi bertugas menentukan kebijakan yang diambil atau strategi jangka panjang maupun jangka pendek. Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi dianggap berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena akan semakin mudah untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Gizka (2013), Pratiwi (2012), Sekaredi (2011), dan Sam'ani (2008) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan.

Ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan. Semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H2: Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR.**

### **2.3.2.3 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan BPR**

Menurut Hutapea (2013), ukuran perusahaan merupakan hal penting dalam proses laporan keuangan karena ukuran perusahaan menjadi tolak ukur besar kecilnya suatu perusahaan dan menjadi salah satu kriteria yang akan dipertimbangkan oleh investor sebelum melakukan investasi. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai perusahaan atau pun hasil nilai dari total aktiva dari suatu perusahaan (Riyanto, 1997). Ukuran perusahaan mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Bank yang berukuran besar cenderung menghasilkan laba yang lebih besar daripada bank yang berukuran kecil. Semakin besar ukuran bank, maka semakin bagus kinerjanya (Nugraheni dan Dody, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Bab ketiga dari skripsi adalah metode penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **3.1.1 Variabel Dependen**

Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan ukuran kinerja perusahaan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan perbankan.

Metode yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini menggunakan:

1. *Non Performing Loan (NPL)*, diukur dari jumlah kredit yang bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diinginkan.
2. Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM), diukur dari perbandingan antara jumlah modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut resiko.
3. *Loan to Debt Ratio (LDR)*, diukur dari total kredit yang disalurkan dibagi dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh BPR.
4. *Return on asset (ROA)*, diukur dari perbandingan antara net income atau laba bersih sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan perbankan.

### 3.1.2 Variabel Independen

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga komponen pengungkapan mekanisme *corporate governance*, yaitu:

#### 1. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance*. Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang memberikan pengarahan kepada manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah total anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan (Darwis, 2009).

Berikut rumus Ukuran Dewan Komisaris:

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \sum \text{anggota dewan komisaris}$$

#### 2. Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi mempunyai peran yang berfungsi sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Jumlah anggota direksi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi yang ada di dalam perusahaan (Suranta dan Machfoedz, 2003).

Berikut rumus Ukuran Dewan Direksi:

$$Ukuran\ Dewan\ Direksi = \sum anggota\ dewan\ direksi$$

### **3. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar kecilnya suatu perusahaan. Variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) diukur dengan menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aset (Susanti, 2011). Hal ini dikarenakan besar total aset masing-masing perusahaan berbeda, bahkan dapat memiliki selisih yang besar.

Berikut rumus Ukuran Perusahaan (*SIZE*):

$$SIZE = Ln\ Total\ Aset$$

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Penentuan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling, yakni metode sampling dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Populasi penelitian ini adalah seluruh BPR yang terdaftar di Bank Indonesia wilayah Jawa Tengah. Jumlah metode sampling menggunakan purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu, yaitu:

1. Data laporan keuangan perusahaan perbankan tersedia berturut-turut untuk tahun pelaporan 2012 sampai dengan 2013.
2. BPR mempublikasikan laporan tahunan untuk periode 31 Desember 2012-2013 di dalam website OJK dan BI.
3. Data diungkapkan secara lengkap, baik data mengenai pengungkapan jumlah dewan komisaris, pengungkapan jumlah dewan direksi, dan total aset perusahaan dalam laporan tahunannya selama periode 2012-2013.

4. BPR yang memiliki laba semakin meningkat dari tahun sebelumnya, karena dari laba yang meningkat dapat mencerminkan kinerja perusahaan semakin baik.

Sesuai kriteria di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 119 Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah dengan tahun penelitian 2012-2013.

**Tabel 3.1 Daftar Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah**

Nomor	Kab/Kota	Nama BPR
1	Banjarnegara	PD. BPR BKK Mandiraja
2	Banyumas	PD. BPR BKK Purwokerto
3	Banyumas	PT. BPR Artha Mekar Sokaraja
4	Banyumas	PT. BPR Dana Mitra Sakti
5	Banyumas	PT. BPR Gunung Simpang Artha
6	Banyumas	PT. BPR Mitra Gema Mandiri
7	Banyumas	PT. BPR Soka Panca Artha
8	Batang	PT. BPR Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
9	Blora	PD. BPR BKK Blora
10	Blora	PT. BPR Dhana Mitratama
11	Blora	PT. BPR Dutabhakti Insani
12	Boyolali	PD. BPR Bank Boyolali
13	Boyolali	PT. BPR Bank Desa Guna Daya
14	Boyolali	PT. BPR Mitra Pandanaran Mandiri
15	Boyolali	PT. BPR Nusaamba Ampel
16	Cilacap	PD. BPR BKK Cilacap
17	Cilacap	PT. BPR Artha Rahayu
18	Cilacap	PT. BPR Banyu Arthacitra
19	Cilacap	PT. BPR Citanduy Artha
20	Cilacap	PT. BPR Gunung Slamet
21	Cilacap	PT. BPR Kroya Bangunharta
22	Cilacap	PT. BPR Ukabima Sejahtera
23	Demak	PD. BPR BKK Demak
24	Demak	PT. BPR Mranggen Mitrapersada
25	Grobogan	PD. BPR Bank Purwa Artha
26	Grobogan	PD. BPR BKK Purwodadi
27	Grobogan	PT. BPR Semeru
28	Jepara	PD. BPR Bank Jepara Artha
29	Jepara	PD. BPR BKK Jepara Kota

Nomor	Kab/Kota	Nama BPR
31	Jepara	PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara
32	Karanganyar	PT. BPR Antar Rumeksa Arta
33	Karanganyar	PT. BPR Bina Sejahtera Insani
34	Karanganyar	PT. BPR Cita Dewi
35	Karanganyar	PT. BPR Kandimadu Arta
35	Karanganyar	PT. BPR Pura Artha Kencana Jatipura
36	Karanganyar	PT. BPR Tawangmangu Jaya
37	Karanganyar	PT. BPR Trihasta Prasodjo
38	Kebumen	PD. BPR BKK Kebumen
39	Kebumen	PD. BPR Kebumen
40	Kendal	PT. BPR Anugerah Harta Kaliwingu
41	Kendal	PT. BPR Citra Darian
42	Kendal	PT. BPR Dhanatani Cepiring
43	Kendal	PT. BPR Enggal Makmur Adi Santoso
44	Kendal	PT. BPR Weleri Jaya Persada
45	Klaten	PT. BPR Bhakti Riyadi Wedi
46	Klaten	PT. BPR Klaten Sejahtera
47	Klaten	PT. BPR Restu Klaten Makmur
48	Kudus	PD. BPR BP Kab. Kudus
49	Kudus	PT. BPR Catur Artha Jaya
50	Kudus	PT. BPR Hartha Muriatama
51	Kudus	PT. BPR Mitra Budikusuma Mandiri
52	Kudus	PT. BPR Taruna Adidaya Santosa
53	Magelang	PD. BPR Bapas 69
54	Magelang	PD. BPR BKK Muntilan
55	Magelang	PT. BPR Artha Mertoyudan
56	Magelang	PT. BPR Artha Sambhara
57	Magelang	PT. BPR Hidup Arthagraha
58	Magelang	PT. BPR Kembang Prama
59	Magelang	PT. BPR Lumbang Artha Muntilanindo
60	Pati	KOP. BPR Wedariyaksa
61	Pati	PD. BPR Bank Daerah Pati
62	Pati	PT. BPR Artha Huda Abadi
63	Pati	PT. BPR Kusuma Arta Rini
64	Pemalang	PD. BPR BKK Taman
65	Pemalang	PT. BPR Hidup Artha Putra
66	Pemalang	PT. BPR Panasayu Arthalayan Sejahtera
67	Purbalingga	PD. BPR BKK Purbalingga
68	Purbalingga	PT. BPR Artha Perwira
69	Purworejo	PD. BPR Bank Purworejo



Nomor	Kab/Kota	Nama BPR
70	Purworejo	PD. BPR BKK purworejo
71	Rembang	PD. BPR BKK Lasem
72	Rembang	PD. BPR Kab. Rembang
73	Semarang	PT. BPR Agung Sejahtera
74	Semarang	PT. BPR Ambarawa Persada
75	Semarang	PT. BPR Mekar Nugraha Klepu
76	Semarang	PT. BPR Mitra Mulia Persada
77	Semarang	PT. BPR Persada Ganda
78	Semarang	PT. BPR Satria Pratiwi Semarang
79	Sragen	PT. BPR Mitra Banaran Mandiri
80	Sukoharjo	PT. BPR Artha Sari Sentosa
81	Sukoharjo	PT. BPR Bekonang Sukoharjo
82	Sukoharjo	PT. BPR Grogol Jaya
83	Sukoharjo	PT. BPR Jadi Manunggal Abadi
84	Sukoharjo	PT. BPR Kartadhani Mulya
85	Sukoharjo	PT. BPR Kartasura Makmur
86	Sukoharjo	PT. BPR Kartasura Saribumi
87	Sukoharjo	PT. BPR Sinarguna Sejahtera
88	Tegal	PD. BKK Kab. Tegal
89	Tegal	PT. BPR Arismentari Ayu
90	Tegal	PT. BPR Artha Puspa Mega
91	Tegal	PT. BPR Bumi Sediaguna
92	Tegal	PT. BPR Dhana Adiwerna
93	Tegal	PT. BPR Nusuma Jateng
94	Tegal	PT. BPR Sahabat Tata
95	Temanggung	PD. BPR BKK Temanggung
96	Temanggung	PD. BPR BP Kab. Temanggung
97	Temanggung	PT. Kedu Arthasetia
98	Temanggung	PT. BPR Multi Arthanusa
99	Wonogiri	PD. BPR BKK Wonogiri
100	Wonosobo	PD. BPR Bank Wonosobo
101	Kota Magelang	PD. BPR Bank Magelang
102	Kota Magelang	PT. BPR Mertoyudan Makmur
103	Kota Magelang	PT. BPR Sinar Garuda
104	Kota Semarang	PT. BP Gunung Merbabu
105	Kota Semarang	PT. BPR Arto Moro
106	Kota Semarang	PT. BPR Jateng
107	Kota Semarang	PT. BPR Kedung Arto
108	Kota Semarang	PT. BPR Mandiri Artha Abadi
109	Kota Semarang	PT. BPR Rudo Indobank

Nomor	Kab/Kota	Nama BPR
110	Kota Semarang	PT. BPR Semarang Margatama Gunadarma
111	Kota Semarang	PT. BPR Setia Karib Abadi
112	Kota Semarang	PT. BPR Weleri Makmur
113	Kota Solo	PD. BPR Dana Utama
114	Kota Solo	PT. BPR Binalanggeng Mulia
115	Kota Solo	PT. BPR Central Internasional
116	Kota Solo	PT. BPR Rejeki Insani
117	Kota Solo	PT. BPR Sukadana
118	Kota Tegal	PD. BPR BKK Tegal
119	Kota Tegal	PT. BPR Central Artha

Sumber: Data Bank Indonesia

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2012-2013. Laporan tahunan dipilih karena laporan tahunan merupakan sumber data yang sangat bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk mengisyaratkan hal-hal penting melalui mekanisme pelaporan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang penting bagi pengguna eksternal, dan tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan berkorelasi positif dengan jumlah informasi yang dikomunikasikan, baik kepada pasar modal, maupun stakeholders dengan menggunakan media lainnya.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan (data sekunder) dan dokumen yang relevan. Dalam hal ini, catatan atau dokumentasi perusahaan yang dimaksud adalah *annual report* perusahaan perbankan dari Bank Indonesia.

### 3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi regresi berganda untuk pengujian hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Penelitian ini menggunakan empat model statistik, karena terdapat variabel dependen yang diukur menggunakan empat rasio keuangan. Model statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Model Pertama

$$NPL = \alpha + \beta_1 \text{ KOMIS} + \beta_2 \text{ DIREKSI} + \beta_3 \text{ SIZE} + \varepsilon$$

2. Model Kedua

$$KPMM = \alpha + \beta_1 \text{ KOMIS} + \beta_2 \text{ DIREKSI} + \beta_3 \text{ SIZE} + \varepsilon$$

3. Model Ketiga

$$LDR = \alpha + \beta_1 \text{ KOMIS} + \beta_2 \text{ DIREKSI} + \beta_3 \text{ SIZE} + \varepsilon$$

4. Model Keempat

$$ROA = \alpha + \beta_1 \text{ KOMIS} + \beta_2 \text{ DIREKSI} + \beta_3 \text{ SIZE} + \varepsilon$$

Keterangan:

NPL = *Non Performing Loan*

KPMM = Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

LDR = *Loan to Deposit Ratio*

ROA = *Return on Assets*

KOMIS = Ukuran Dewan Komisaris

DIREKSI = Ukuran Dewan Direksi

SIZE = Ukuran Perusahaan

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = koefisien

$\varepsilon$  = error

### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Analisis digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian. Gambaran yang diberikan dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kuortis, dan skewness (kemencengen distribusi). Metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini adalah metode numerik yang berfungsi untuk mengenali pola sejumlah data, merangkum informasi tersebut dalam bentuk yang diinginkan dalam penelitian Ghozali (2011).

### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan analisis berganda, maka data yang telah dikumpulkan akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar. Pengujian tersebut antara lain.

#### **3.5.2.1 Uji Multikolinearitas**

Pengujian multikolinearitas menurut Ghozali (2011), bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan sempurna antar variabel independen pada model regresi. Dalam hal ini yang akan diuji bukan ada tidaknya multikolinearitas namun berbahaya atau tidaknya, sebab tidak ada suatu persamaanpun tanpa multikolenearitas. Uji ini merupakan pengujian untuk melihat adanya keterkaitan hubungan antar variabel independen. Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan

indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance value* tiap-tiap variabel independen.

### **3.5.2.2 Uji Autokorelasi**

Menurut Ghozali (2011) uji autokorelasi merupakan suatu alat analisis dalam uji penyimpangan asumsi klasik yang memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan masalah ini biasanya terjadi pada observasi yang menggunakan data *time series*. Konsekuensi dari adanya autokorelasi dari suatu model regresi adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya, dan model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel tidak bisa tertentu. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya uji Durbin-Watson (DW test) hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen.

### **3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari kesalahan residual melalui satu pengamatan kepengamatan lainnya. Ini berarti pengujian dimaksudkan untuk

melihat jarak kuadrat titik-titik sebaran terhadap garis regresi. Untuk itu dilakukan dengan uji glejser meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi:

$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$  , dimana menurut Ghozali (2011)  $U_t$  merupakan unsur kesalahan.

#### **3.5.2.4 Uji Normalitas**

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah suatu data terdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan dengan uji grafik *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal membentuk garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Menurut Ghozali (2011), jika distribusi data adalah normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Selain itu digunakan uji kolmogorov smirnov mempunyai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal.

#### **3.5.3 Uji Goodness of Fit**

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik F, nilai statistik t dan nilai koefisien determinasi.

##### **3.5.3.1 Uji Simultan (Uji F)**

Uji F dilakukan untuk menguji signifikan koefisien regresi secara bersama-sama menunjukkan pengaruh semua variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan cara menggunakan tingkat signifikansi dan analisa hipotesis.

Tingkat signifikansi atau  $\alpha$  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%, dan untuk membuktikan apakah  $H_0$  diterima atau tidak dalam penelitian ini digunakan dengan melihat nilai P-value nya. Bila nilai P value dari  $V > 5\%$  ( $\alpha$ ) maka  $H_0 =$  diterima dan  $H_a =$  ditolak, artinya secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai P value dari  $F < 5\%$  ( $\alpha$ ) maka  $H_0 =$  ditolak dan  $H_a =$  diterima, artinya secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen menurut Ghozali (2011).

### **3.5.3.2 Uji Parsial (Uji t)**

Untuk melakukan apakah semua variabel secara individual terhadap penyaluran kredit maka pengujian yang dilakukan adalah uji t. Uji t digunakan untuk menguji signifikan koefisien regresi secara parsial atau pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan melihat tingkat signifikan atau  $\alpha$ , dimana dalam penelitian ini  $\alpha$  yang digunakan adalah 5%. Untuk melakukan uji t digunakan perbandingan nilai P-value dari t dari masing-masing variabel independen terhadap  $\alpha$  yaitu 5%.

1. Bila nilai P value dari t masing-masing variabel independen  $> 5\%$  ( $\alpha$ ), maka  $H_0 = b_i \neq 0$  diterima dan  $H_a : b_i = 0$  ditolak, artinya secara individual variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Sebaliknya bila P value dari t tiap variabel independen kurang dari  $\alpha$  maka  $H_0 : b_i \neq 0$  ditolak dan  $H_a : b_i = 0$  diterima, artinya secara individual masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen menurut Ghozali (2011).

### 3.5.3.3 Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2011) Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.